



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

Bismillahi Rohmaanir Rohiim

Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Saudara-saudara masyarakat Kabupaten Sumedang yang kami hormati dan kami cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. RLPPD ini disamping merupakan aktualisasi dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020. Dengan terselesainya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini, kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dengan sumbang saran dan pemikiran. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Esa meridloi segala upaya kita dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumedang “*Sejahtera, Agamis, dan Demokratis pada tahun 2025*”.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis Daerah

- Batas Administrasi Dan Luas Wilayah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44’-70°83’ Lintang Selatan dan 107°21’-108°21’ Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 1.159.454 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin meliputi 584.770 jiwa atau 50,43% penduduk laki-laki dan 574.684 jiwa atau 49,57% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 98.636 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 11.623 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan
Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2020

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatinangor	22.465	21.599	44.064
2	Cimanggung	23.229	22.664	45.893
3	Tanjungsari	18.702	18.276	36.978
4	Sukasari	12.574	12.072	24.646
5	Pamulihan	15.345	15.136	30.481
6	Rancakalong	21.258	20.837	42.095
7	Sumedang Selatan	14.297	14.631	28.928
8	Sumedang Utara	19.143	18.998	38.141
9	Ganeas	5.831	5.792	11.623
10	Situraja	16.300	16.634	32.934
11	Cisitu	42.546	41.582	84.128
12	Darmaraja	16.884	16.303	33.187
13	Cibugel	44.236	42.563	86.799
14	Wado	46.096	44.765	90.861
15	Jatinunggal	20.522	20.266	40.788
16	Jatigede	40.625	39.965	80.590
17	Tomo	22.465	21.599	44.064
18	Ujungjaya	49.744	48.892	98.636
19	Conggeang	13.149	12.766	25.915
20	Paseh	17.480	17.044	34.524
21	Cimalaka	13.081	13.191	26.272
22	Cisarua	31.300	30.708	62.008
23	Tanjungkerta	10.466	10.394	20.860
24	Tanjungmedar	11.622	11.843	23.465
25	Buahdua	15.585	15.800	31.385
26	Surian	11.064	11.344	22.408
	Jumlah	584.770	574.684	1.159.454

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, Per 31 Desember 2020

II. VISI DAN MISI KABUPATEN SUMEDANG

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah.

Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Adapun Visi Kabupaten Sumedang yang ingin diwujudkan adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU,
PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI)
PADA TAHUN 2023 ”**

SIMPATI merupakan kependekan dari Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif. Penjabaran dari kata-kata kuncinya adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

KREATIF : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh

dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah "**Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehati)**" diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023**".

Misi 1 jangka panjang "Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat" diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 2** "Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan".

Misi 2 jangka panjang "Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri" diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 "Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal" dan Misi 5 "Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang".

Misi 3 jangka panjang "Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila" diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1 "Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat" dan Misi 2 "Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan".

Misi 4 jangka menengah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik" diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4 "Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat".

Misi 5 jangka menengah "Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia" diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 "Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal".

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau

- Tujuan 1** : **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Tujuan 2 : **Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata**
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata
Tujuan 3 : **Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sasaran 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

Misi Kedua : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan

- Tujuan 1** : **Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang**
Sasaran 1 : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
Sasaran 2 : Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal

- Tujuan 1** : **Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata**
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat
Sasaran 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis
Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah
Sasaran 5 : Meningkatkan pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata
Sasaran 6 : Meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang
Tujuan 2 : **Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan**
Sasaran 1 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

- Tujuan 1** : **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi**

- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara
- Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas**
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

- Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif**
- Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif
- Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pas

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pada Tahun 2020, implementasi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Dengan berkembangnya pandemi ini, memberikan pengaruh terhadap capaian pembangunan daerah di tahun 2020, salah satunya terhadap indikator makro sosial dan ekonomi Kabupaten Sumedang. Kecenderungan perkembangan kondisi kesejahteraan dan perekonomian secara global menunjukkan kondisi yang terus menurun dan diprediksikan akan terus terpuruk seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi mempengaruhi konstansi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Adanya kebijakan pembendungan (*containment policy*) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pandemi berdampak secara signifikan terhadap sektor ekonomi. BPS Jawa Barat dalam laporan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2020 merilis bahwa pertumbuhan ekonomi terkontraksi ke -1,12. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor informasi dan komunikasi (22,90%), sektor pertambangan dan penggalian (1,41%) serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (2,82%), jasa pendidikan (3,24%) dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (3,23%).

Penurunan target indikator makro ekonomi tersebut secara spesifik diprediksi akibat:

1. Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan dalam dan luar negeri
Adanya perubahan rantai produksi, setiap wilayah atau negara diprediksikan akan menghentikan ekspor komoditas utama, terutama komoditas pertanian, mereka ke wilayah/negara lain dikarenakan setiap wilayah/negara dituntut untuk mengamankan pasokan dalam negerinya. Hal tersebut berdampak bahwa Kabupaten Sumedang harus siap secara mandiri dalam meningkatkan pasokan ke wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Penurunan dari aktivitas pariwisata

Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemik COVID dispesifikasikan sebagai penurunan vertikal dari kurva permintaan ekspor terkait pariwisata (yaitu perhotelan, restoran dan transportasi). Disrupsi produksi sebagai dampak dari PSBB

Berdasarkan hasil analisis UNPAD (2020), disrupsi aktivitas produksi adalah penurunan produktivitas sebagai dampak dari PSBB yang dilakukan untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Dengan kata lain, adanya penurunan *total factor productivity* yang dialami oleh industri dari semua skala ekonomi (mikro, kecil, menengah, dan besar). Namun demikian, UNPAD (2020) memberikan penjelasan bahwa nilai *productivity shock*-nya bersifat *sector-region-specific* dalam arti berbeda-beda tergantung sektornya apa dan lokasinya di wilayah mana, yang meliputi asumsi:

- a. Karena karakteristik proses produksi maka, sektor pertanian efeknya minimal karena tidak begitu memerlukan *physical distancing* antara pelakunya, sektor jasa diasumsikan lebih bisa memanfaatkan *work from home*, sementara sektor industri Pengolahan terkena dampak karena karakteristik produksinya relatif membutuhkan sistem produksi massal;

b. Tingkat informalitas dari sektor dan wilayah;

Derajat *enforcement* dari pembatasan akan cenderung lebih kuat di daerah-daerah berkepadatan penduduk tinggi karena tingkat resiko penularannya tinggi. Diasumsikan pembatasan produksi efektif terjadi hanya satu bulan.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Makro
Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,44	71,64	98,90%	Sangat Tinggi
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,48	8,51	100,35%	Sangat Tinggi
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	12,97	96,50%	Sangat Tinggi
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,16	10,26	74,27%	Sedang
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,34	95,01	99,65	Sangat Tinggi
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	69,77	70,57	101,15	Sangat Tinggi
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73	72,2	98,93	Sangat Tinggi
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01	6,32	86,16	Tinggi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	70,8	76,96	108,70%	Sangat Tinggi
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64	64,46	100,72%	Sangat Tinggi
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,18	70,89	119,79%	Sangat Tinggi
	Indeks Risiko Bencana	Poin	150	142,2	105,20%	Sangat Tinggi
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB	B	85,92%	Tinggi
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70	60,01	85,73%	Tinggi
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	83,80	100,98%	Sangat Tinggi

Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran Per-Kapita	Rp. (Juta)	10,38	10,22	98,46%	Sangat Tinggi
Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,35	9,89	44,25%	Sangat Rendah
	Jumlah UMKM	UMKM	17.467	16.468	94,28%	Sangat Tinggi
Rata-rata					94,73%	Sangat Tinggi

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib, yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,10%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,33%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,04%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,47%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

2. URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,05%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	66,67%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,12%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,10%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,83%
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,70%

9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,62%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,40%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,14%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94,55%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	42,06%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	63,24%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,46
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,31
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4,99
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	76,96
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,08
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani oleh pemerintah	0
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,28
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2020

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	642744 warga
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6456 warga
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6456 warga
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	170,97

Sumber : Satpolpp Damkar dan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020

6. URUSAN SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	10,79
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2020

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 Terhadap LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018, Kabupaten Sumedang mendapatkan skor 3,2485 dengan status ST (Sangat Tinggi).

B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

VI. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

						(Dalam Rupiah)
NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a)	194.937.625.000,0 0	181.036.793.797,0 0	92,87	205.521.153.763,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b)	6.983.173.826,00	8.300.206.720,00	118,86	10.263.528.592,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c)	12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	85,09	9.727.083.922,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d)	234.764.759.217,2 2	244.163.908.111,4 4	104,00	238.016.683.045,47
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	449.530.481.156,2 2	444.430.236.011,4 4	98,87	463.528.449.322,47
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a). 1	74.164.995.653,00	73.932.562.509,00	99,69	47.162.704.868,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a). 2	23.487.914.761,00	23.487.914.761,00	100,00	39.431.438.751,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a). 3	1.082.326.099.000,00	1.065.253.951.000,00	98,42	1.180.828.452.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a). 4	474.022.235.000,0 0	465.666.387.700,0 0	98,24	474.761.839.166,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a)	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	98,45	1.742.184.434.785,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b). 1	84.002.531.000,00	84.002.531.000,00	100,00	49.222.417.000,00
19	Dana Desa	5.1.1.2.b). 2	222.389.199.000,0 0	222.389.199.000,0 0	100,00	218.940.541.600,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b)	306.391.730.000,0 0	306.391.730.000,0 0	100,00	268.162.958.600,00
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c)	155.447.099.612,0 0	134.266.775.232,0 0	86,37	136.437.021.093,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.c)	155.447.099.612,0 0	134.266.775.232,0 0	86,37	136.437.021.093,00
25	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.2.d)	269.034.722.984,0 0	249.347.835.249,0 0	92,68	330.657.094.372,00
26	Total Pendapatan Transfer	5.1.1.2	2.384.874.797.010,00	2.318.347.156.451,00	97,21	2.477.441.508.850,00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	148.904.760.000,0	141.612.082.721,0	95,10	128.579.320.000,00

			0	0			
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.1.1.3	148.904.760.000,00	141.612.082.721,00	95,10	128.579.320.000,00	
31	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	2.983.310.038.166,22	2.904.389.475.183,44	97,35	3.069.549.278.172,47	
33	BELANJA						
34	BELANJA OPERASI						
35	Belanja Pegawai	5.1.2.A.1	1.238.661.574.995,96	1.176.209.206.916,00	94,96	1.237.660.161.762,00	
36	Belanja Barang Jasa	5.1.2.A.2	800.015.273.622,80	738.888.358.513,00	92,36	756.858.884.832,69	
	NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
37	Belanja Hibah	5.1.2.A.3	35.048.884.500,00	33.562.360.500,00	95,76	35.591.700.000,00	
38	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A.4	1.222.750.000,00	1.222.650.000,00	99,99	3.367.912.900,00	
39	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.A	2.074.948.483.118,76	1.949.882.575.929,00	93,97	2.033.478.659.494,69	
41	BELANJA MODAL						
42	Belanja Tanah	5.1.2.B.1	33.579.200.000,00	33.328.265.935,00	99,25	18.722.717.888,00	
43	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.B.2	204.139.832.213,17	198.148.478.293,00	97,07	241.517.168.061,00	
44	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.B.3	155.237.807.379,06	142.070.482.407,00	91,52	135.342.553.756,28	
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B.4	82.593.345.440,70	68.315.142.935,00	82,71	145.563.152.918,00	
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B.5	7.098.637.500,00	7.089.359.075,00	99,87	14.605.384.629,00	
47	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.B.6	55.540.375.288,00	49.545.947.407,00	89,21	49.947.373.760,00	
48	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.B	538.189.197.820,93	498.497.676.052,00	92,62	605.698.351.012,28	
50	BELANJA TIDAK TERDUGA						
51	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.C	97.194.436.487,70	46.401.777.454,00	47,74	12.699.900,00	
52	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.C	97.194.436.487,70	46.401.777.454,00	47,74	12.699.900,00	
53	JUMLAH BELANJA	5.1.2	2.710.332.117.427,39	2.494.782.029.435,00	92,05	2.639.189.710.406,97	
55	TRANSFER						
56	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA						
57	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.A.1	19.475.975.000,00	19.380.406.816,00	99,51	22.205.040.000,00	
58	Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.A.2	663.875.000,00	663.701.000,00	99,97	1.133.614.000,00	
59	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	5.1.3.A	20.139.850.000,00	20.044.107.816,00	99,52	23.338.654.000,00	
61	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN						
62	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.B.1	354.188.515.240,00	353.440.572.232,00	99,79	359.171.585.751,00	
63	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.B.2	0,00	0,00	-	921.871.000,00	
64	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	5.1.3.B	354.188.515.240,00	353.440.572.232,00	99,79	360.093.456.751,00	
65	JUMLAH TRANSFER	5.1.3	374.328.365.240,00	373.484.680.048,00	99,77	383.432.110.751,00	
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.084.660.482.667,39	2.868.266.709.483,00	92,98	3.022.621.821.157,97	
68	SURPLUS/DEFISIT		(101.350.444.501,17)	36.122.765.700,44	(35,64)	46.927.457.014,50	
70	PEMBIAYAAN						
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
72	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.A.1	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00	107.166.975.872,67	
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.A.2	30.000.000.000,00	51.000.000.000,00	170,00	124.443.530.800,00	
74	Jumlah Penerimaan	5.1.4.A	142.930.843.943,17	163.930.843.943,17	114,69	231.610.506.672,67	

76	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
77	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.B.1	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	100,00	6.918.552.264,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.B.2	30.000.000.000,00	71.000.000.000,00	236,67	158.688.567.480,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.B.3	2.180.399.442,00	2.180.399.442,00	100,00	0,00
80	Jumlah Pengeluaran	5.1.4.B	41.580.399.442,00	82.580.399.442,00	198,60	165.607.119.744,00
81	PEMBIAYAAN NETTO		101.350.444.501,17	81.350.444.501,17	80,27	66.003.386.928,67
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4.C	(0,00)	117.473.210.201,61	-	112.930.843.943,17

Sumber : BPKAD Kabupaten Sumedang

VII. INOVASI DAERAH

Inovasi menjadi salah satu komponen bagi pemerintah pusat dalam menentukan pemberian dana insentif daerah dan perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan. Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah dengan tahapannya antarlain sosialisasi dan bimtek penyusunan proposal inovasi daerah, pendampingan penyusunan proposal inovasi daerah dan rapat koordinasi inovasi daerah.

Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 telah meluncurkan beberapa inovasi berbentuk aplikasi non aplikasi, diantaranya yaitu :

1. **MARKONAH** (Mari Kerja Online Dari Rumah) yang diharapkan dapat menjaga produktifitas ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meskipun dalam kondisi WFH karena adanya pandemi covid-19;
2. **MAUNEH** (Mari Update Data Agar Bansos Terarah dan Tidak Nyeleneh), merupakan aplikasi yang dapat membantu dan membuka pelaporan dari masyarakat terkait data penerima bantuan sosial akibat terdampak covid-19 dan di masa yang akan datang dapat dikembangkan menjadi alat untuk pengambilan keputusan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
3. **SILASIDAKEP** (Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan), yang diluncurkan dalam rangka memenuhi layanan kependudukan bagi masyarakat ditengah upaya pencegahan penyebaran covid-19;
4. **SI ICE MANDIRI** (Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri) yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara online. Masyarakat cukup mengakses aplikasi yang ada. Seluruh proses perizinan mulai dari permohonan sampai diterbitkannya izin dilaksanakan melalui aplikasi, sehingga kontak fisik atau pertemuan antara pemohon dengan penyelenggara sudah tidak diperlukan;
5. **MAIJAH** (Mari Jaga dan Cegah), merupakan aplikasi yang menyajikan data real time disetiap check point pada saat pemberlakuan PSBB di kabupaten Sumedang, yang menampilkan informasi kasus covid-19 berupa data terkonfirmasi positif, sembuh dan meninggal; hasil test swab dan rapid test; orang dengan resiko (ODR), orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP); pasien dalam pengawasan (PDP); dan laporan pelanggaran PSBB
6. **AMARI** (Aplikasi Mawas Diri Covid-19) yang dikembangkan untuk merespon urgensi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemutusan rantai penularan virus Sars-Cov-2 secara tepat dan cepat, termasuk melindungi populasi rentan seperti lansia, masyarakat berpenyakit kronis dan gangguan sistem imun, maupun tenaga Kesehatan yang berhadapan dengan pasien bergejala ILI (influenza like illness). Aplikasi ini menghasilkan berbasis data yang kemudian digunakan relawan (mahasiswa, dokter, bidan, perawat dan psikolog) untuk melakukan edukasi maupun perawatan Kesehatan secara jarak jauh: teledukasi dan telemedicine. Kegiatan

tersebut merupakan bagian dari sistem Kesehatan yang perlu dikembangkan dalam situasi pembatasan pergerakan secara massal dan physical distancing.

VIII. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Hasil pembangunan di Kabupaten Sumedang pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Sumedang, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang lainnya.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.sumedangkab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat menyampaikan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang.

Demikian RLPPD ini kami sampaikan, semoga Allah Subhana Wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin Ya Allah

Sumedang, Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.